

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri mulai dari aspek pemerintahan, keuangan maupun pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan menjalankannya secara tepat, bertanggung jawab dan transparan. Pengelolaan ini dijalankan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan perkembangan pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah baik dari segi internal yaitu dengan meningkatkan kinerja yang optimal dan dari segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan peningkatan pelayanan publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan pemerintah selama satu periode pelaporan. Informasi ini sangat berguna untuk pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang membutuhkan informasi ini adalah pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Pihak eksternal yang menggunakan informasi ini adalah kreditur, investor, bank, pemerintah dari daerah lain ataupun pihak lain dari negara asing untuk hal pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oleh karena itu, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki tujuh (7) komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

Laporan arus kas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pemerintah dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Arus kas masuk adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah dan arus kas keluar adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah. Melalui laporan arus kas dapat diketahui berapa kenaikan atau penurunan kas bersih dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo yang dimiliki pemerintah daerah sampai dengan akhir periode.

Berkaitan dengan analisis yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, laporan arus kas juga turut dianalisis oleh para pengguna sesuai dengan kepentingan atau keperluan terhadap laporan tersebut. Sebagai laporan keuangan yang penting bagi pemerintahan, maka analisis laporan arus kas perlu dilakukan untuk memungkinkan kita menilai kualitas keputusan pemerintah dari waktu ke waktu dan dampaknya pada hasil operasi dan posisi keuangan pemerintah. Analisis juga memungkinkan kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan kestabilan arus kas operasi. Operasi yang menguntungkan menghasilkan pemulihan kas melebihi jumlah yang diinvestasikan, dan sebagai konsekuensinya meningkatkan arus kas masuk. Sedangkan kerugian memberikan hasil yang sebaliknya.

Pemerintah Kabupaten Belu adalah pihak yang diberikan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Belu sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menurut peraturan tentunya wajib menyusun laporan keuangan daerah, salah satunya adalah Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Belu. Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Belu
Tahun Anggaran 2014-2018

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
2	Arus Kas Masuk					
3	Pendapatan Pajak Daerah	8.234.295.056	12.614.389.488	16.177.145.157	15.513.025.177	21.947.183.834
4	Pendapatan Retribusi Daerah	44.506.360.715	10.020.240.454	6.559.012.467	5.963.132.236	6.183.958.819
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.147.512.408	5.561.685.579	5.996.676.620	7.990.350.405	7.507.271.925
6	Lain-Lain PAD yang Sah	12.108.118.338	44.171.628.383	12.699.661.661	9.660.997.507	9.815.494.044
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	452.094.507.017	578.467.976.007	676.380.888.419	779.291.768.009	719.295.914.950
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	48.007.662.000	50.134.595.000	40.020.257.600	56.138.672.200	72.451.173.000
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	15.310.938.520	16.765.511.936	17.477.876.554	22.188.306.443	20.771.848.169
10	Bantuan Keuangan	-	19.579.257.000	216.000.000	-	-
11	Pendapatan Hibah	801.941.179	1.270.638.723	7.523.950.432	852.593.410	-
12	Pendapatan Dana Darurat	234.600.000	-	-	-	-
13	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 12)	586.445.935.234	738.585.922.570	783.051.468.910	897.598.845.387	857.972.844.741
14	Arus Kas Keluar					
15	Belanja Pegawai	345.270.772.728	376.533.707.636	346.381.815.568	303.350.545.507	309.091.811.956
16	Belanja Barang dan Jasa	91.620.079.768	134.232.141.612	161.649.457.833	197.568.604.177	240.466.999.399
17	Belanja Subsidi	-	-	3.712.608.000	4.083.840.000	-
18	Belanja Hibah	3.000.000.000	26.623.040.450	1.905.457.500	3.730.400.000	7.789.806.000
19	Belanja Bantuan Sosial	1.465.000.000	-	-	12.585.000.000	7.960.000.000
20	Belanja Bantuan Keuangan	3.334.616.913	63.597.684.623	93.477.551.470	110.971.631.968	124.193.933.368
21	Belanja Tak Terduga	-	-	1.203.296.071	237.925.000	9.430.437
22	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	1.146.094.600	922.236.738	1.522.308.422	1.552.151.269
23	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	271.329.400	306.606.821	-	519.661.143
24	Jumlah Arus Kas Keluar (15 s/d 23)	444.690.669.409	602.403.998.321	609.559.030.001	634.050.255.074	691.583.793.572
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (13-24)	141.755.465.825	136.181.924.249	173.492.438.909	263.548.590.313	166.389.051.169
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
27	Arus Kas Masuk					
28	Hasil Pencairan Dana Cadangan	3.000.000.000	-	-	-	-
29	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	231.192.000	34.734.000	50.200.000	-	-
30	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	2.780.000	-	31.683.500	16.776.500
31	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	12.346.000	10.736.000	-	86.557.900	-
32	Jumlah Arus Kas Masuk (28 s/d 31)	3.243.538.000	48.250.000	50.200.000	118.241.400	16.776.500

33	Arus Kas Keluar					
34	Belanja Modal Tanah	-	886.300.000	4.034.545.000	292.725.000	-
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.963.914.100	48.948.967.140	60.081.430.643	33.192.969.528	18.788.552.358
36	Belanja Gedung dan Bangunan	29.237.160.920	48.419.630.367	30.645.334.689	97.501.171.977	96.696.297.083
38	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.995.089.400	53.123.137.401	95.777.002.025	104.613.449.964	67.710.456.177
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	482.139.326	4.111.198.277	50.000.000	5.896.113.527	2.240.761.297
38	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	23.750.000.000	-	-	-
39	Jumlah Arus Kas Keluar (34 s/d 38)	96.678.303.746	179.239.233.185	190.588.312.357	241.495.429.995	185.436.066.915
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (32-39)	(93.434.765.746)	(179.190.983.185)	(190.538.112.357)	(241.378.188.596)	(185.419.290.415)
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
42	Arus Kas Masuk					
43	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	45.528.000
44	Jumlah Arus Kas Masuk(43)	-	-	-	-	45.528.000
45	Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44-45)	-	-	-	-	45.528.000
47	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris					
48	Arus Kas Masuk					
49	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52.551.395.700	57.972.120.640	54.274.817.106	53.835.323.314	48.484.059.950
50	Jumlah Arus Kas Masuk (49)	52.551.395.700	57.971.120.640	54.274.817.106	53.835.323.314	48.484.059.950
51	Arus Kas Keluar					
52	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.440.444.480	57.071.731.398	57.957.753.289	54.857.695.775	48.617.235.815
53	Jumlah Arus Kas Keluar(52)	59.440.444.480	57.071.731.398	57.957.753.289	54.857.695.775	48.617.235.815
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (50-53)	(6.889.048.780)	899.389.241	(3.682.936.183)	(1.022.372.461)	(133.175.865)
55	Kenaikan/Penurunan Kas (25+40+46+54)	41.431.651.299	(42.109.669.693)	(20.728.609.630)	21.148.029.256	(19.117.887.110)
56	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	109.513.480.314	150.999.797.228	102.508.650.887	42.780.041.257	31.928.070.513
57	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	150.996.913.228	102.508.650.887	81.780.041.257	63.928.070.513	12.810.183.403
58	Kas di BLUD	4.461.805.632	4.719.169.306	1.492.595.034	1.304.363.567	1.692.087.081
59	Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	1.888.660.928	744.566.691
60	Kas di Bendahara BOS	-	-	3.867.726.819	3.880.356.870	1.624.989.298
61	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	-	1.662.307.342	3.887.339.658	-	-
62	Setara Kas	-	-	-	31.000.000.000	71.000.000.000
63	Saldo Akhir Kas (57 s/d 60)	155.458.718.861	108.890.127.535	91.027.702.968	102.001.451.878	87.871.826.474

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa arus kas yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Belu dari Tahun Anggaran 2014-2018 menunjukan bahwa terjadi kenaikan/penurunan arus kas bersih dari seluruh aktivitas. Dimana, pada tahun 2014 jumlah arus kas masuk lebih besar daripada jumlah arus kas keluar, sehingga jumlah arus kas bersih tahun 2014 mengalami surplus. Pada tahun 2015 jumlah arus kas keluar lebih besar daripada jumlah arus kas masuk, sehingga jumlah arus kas bersih pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 mengakibatkan terjadi defisit kas. Pada tahun 2016 jumlah arus kas keluar lebih besar daripada jumlah arus kas masuk, sehingga jumlah arus kas bersih pada tahun 2016 mengalami defisit kas namun mengalami peningkatan kas dari tahun 2015. Pada tahun 2017 jumlah arus kas masuk lebih besar daripada jumlah arus kas keluar, sehingga jumlah arus kas bersih pada tahun 2017 mengalami kenaikan dan terjadi surplus kas. Namun, pada tahun 2018 jumlah arus kas keluar lebih besar daripada jumlah arus kas masuk, sehingga jumlah arus kas bersih pada tahun 2018 mengalami defisit kas dan mengalami penurunan kas dari tahun 2017.

Apabila arus kas yang mengalami peningkatan menghasilkan pemulihan kas dan atau menambah persediaan kas, sedangkan arus kas yang mengalami penurunan akan mengurangi saldo kas dan atau mengurangi persediaan kas. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus memperhatikan kondisi keuangan yang ada serta membenahi cara pengelolaan kas agar dapat menyeimbangkan kondisi keuangan pemerintah

tersebut. Maka analisis arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui sumber dan penggunaan kas serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan/penurunan kas bersih selama tahun 2014 sampai 2018. Selain itu, dengan adanya analisis ini akan membantu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam menilai apakah kebijakan yang ditetapkan telah berjalan dengan baik dalam memperoleh serta menggunakan kas tersebut dalam suatu periode.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu periode Tahun Anggaran 2014-2018?
2. Apakah faktor penyebab kenaikan/penurunan kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu periode Tahun Anggaran 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi atau perkembangan kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab kenaikan/penurunan kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi Instansi

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu, terkait dengan solusi masalah Arus Kas.

2. Bagi Mahasiswa

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dalam menambah bahan kajian dan perbandingan bagi mahasiswa yang akan menyusun karya tulis ilmiah dengan masalah yang sama bagi mahasiswa dan diharapkan dapat memperkaya pemahaman, kemampuan analisis dan akademik mahasiswa dalam hal pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kondisi nyata mengenai Analisis Arus Kas.